

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah suatu daerah diharapkan dapat lebih mandiri tidak hanya dalam hal pembiayaan tetapi juga kemampuan pengelolaan di daerahnya, dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan asas otonomi dan kewajiban pembantuan serta kemandirian seluas-luasnya dalam kesatuan sistem dan prinsip kebangsaan Indonesia. Diharapkan dalam UUD 1945, pemerintahan suatu daerah semakin dekat dengan berbagai pelayanan publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi, lebih banyak dukungan masyarakat berharap untuk berpartisipasi dalam pemerintah daerah. Inti dari otonomi daerah adalah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan dan pengelolaan daerah (termasuk pengelolaan keuangan).

Di tingkat provinsi dan kabupaten / kota, pengelolaan keuangan suatu daerah mengalami perubahan. Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan pemerintahan telah menjadi kekuasaan daerah akibat adanya pelimpahan urusan pemerintahan (diantara pemegang Pasal 283 UU Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 23/2014).

(Achmad, 2019) Government expenditure (pengeluaran pemerintah) merupakan semua pembelian yang dilakukan oleh pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa untuk kepentingan masyarakat. (Dumairy, 2006) Metode pengeluaran dapat digunakan untuk menghitung pendapatan nasional rumusnya

yaitu: $Y = C + I + G + (X-M)$. Selain permintaan sektor rumah tangga (C) barang dan jasa konsumen, permintaan sektor komersial untuk (I) barang investasi, (G) pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, dan tujuan impor dan ekspor (XM) sektor luar negeri.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dibedakan menjadi dua kategori, ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung ialah belanja anggaran yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan rencana dan kegiatan. Sedangkan belanja tidak langsung ialah belanja anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan rencana dan kegiatan.

Pada suatu perekonomian daerah, perkembangan PDRB mengidentifikasi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan di suatu daerahnya dalam mendorong peningkatan output suatu daerahnya. Untuk meningkatkan produk domestik bruto tahunan daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan daerah. Sedangkan menurut (Lincoln Arsyad, 1999) menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi suatu daerah adalah suatu proses dimana pemerintah suatu daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta guna menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi / pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah tersebut.

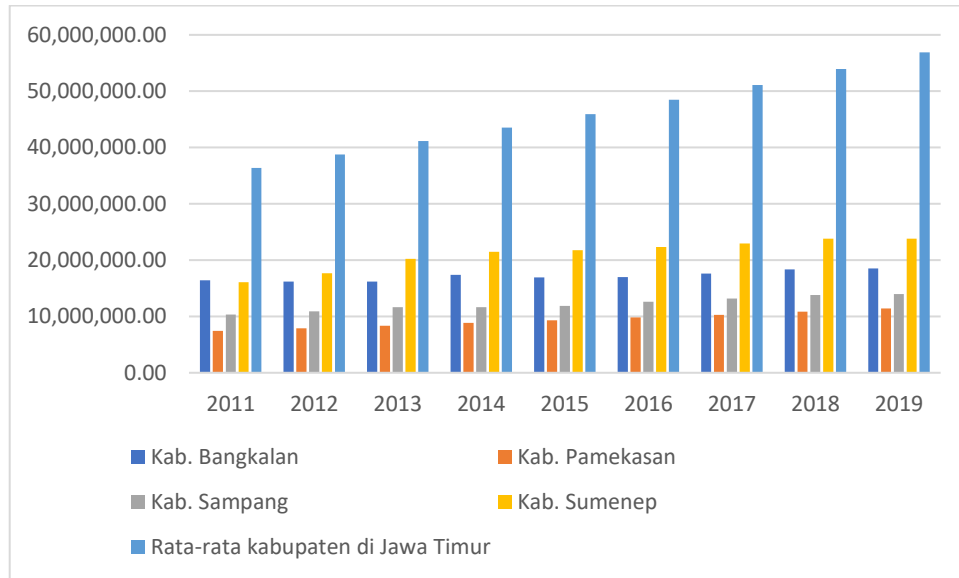
Kegiatan belanja tidak langsung ini merupakan rencana alternatif yang dapat merangsang seluruh daerah untuk mencapai tujuan bersama, tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan sehari-hari yang akan dilakukan merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pengeluaran belanja tidak langsung dan belanja langsung terdapat dalam realisasi APBD yang disediakan oleh DJPK KEMENKEU dan dinyatakan dalam bentuk rupiah. Sedangkan data PDRB tersedia dalam Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinyatakan dalam bentuk rupiah.

Besaran nilai PDRB pengeluaran adalah sirkulasi arus barang-barang dan jasa-jasa yang telah diproduksi oleh masing sektor ekonomi guna dikonsumsi untuk semua komponen pengeluaran. PDRB menurut pengeluaran dibagi menjadi enam komponen, yaitu ekspor impor luar negeri serta net ekspor, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, perubahan inventori, pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumahtangga, PMTB, dan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah.

Pulau Madura ini bagian Provinsi Jawa Timur dengan kondisi perekonomian yang relatif tertinggal dibandingkan sub suatu daerah lain. Dalam hal tersebut ditunjukkan dengan rendahnya nilai PDRB empat Kabupaten/Kota di Pulau Madura dibandingkan kabupaten lain yang ada di Jawa Timur. Gambaran tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi di empat Kabupaten/Kota di Pulau Madura dibandingkan dengan Kabupaten yang berada di Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1

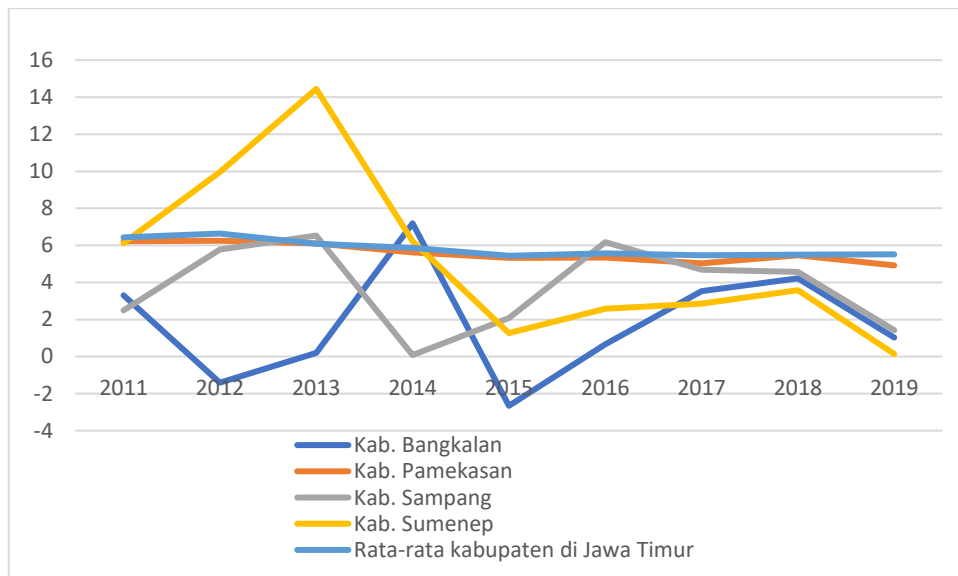
PDRB Empat Kabupaten/Kota di Pulau Madura dan Rata-rata Kabupaten Di Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran 2011-2019 (Jutaan)



Sumber : Data yang telah diolah dari Badan Pusat statistik 2011-2019.

Gambar 1.2

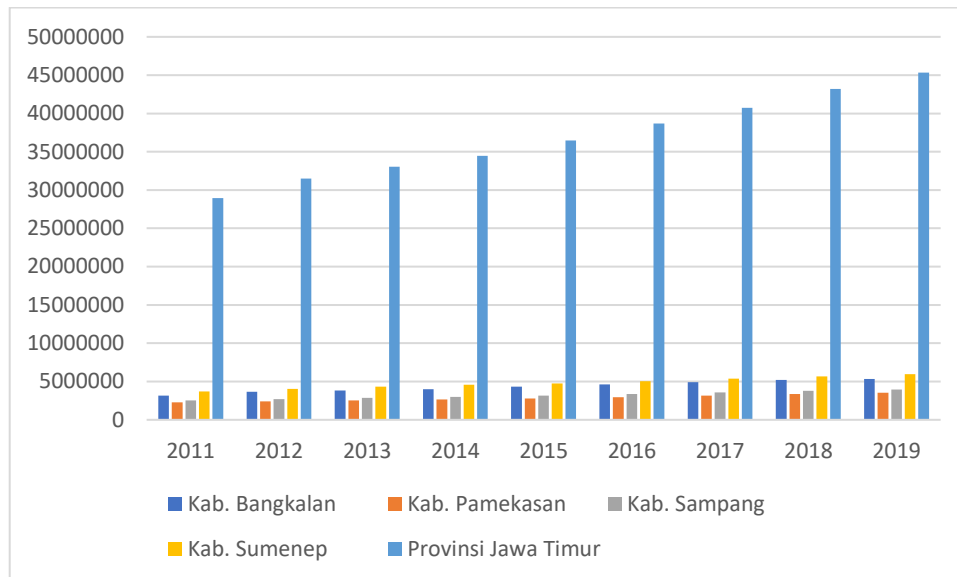
Laju Pertumbuhan PDRB Empat Kabupaten/Kota di Pulau Madura dan Rata-rata Kabupaten Di Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran 2011-2019 (Persen)



Sumber : Data yang telah diolah dari Badan Pusat statistik 2011-2019.

Gambar 1.3

PMTB Empat Kabupaten/Kota di Pulau Madura dan Rata-rata Kabupaten Di Jawa Timur 2011-2019



Sumber : Data yang telah diolah dari Badan Pusat statistik 2011-2019.

1. Kabupaten Bangkalan

Dapat dilihat pada Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa perkembangan 4 Kab. / Kota pada Pulau Madura setiap periodenya meningkat, dari 4 Kabupaten Pulau Madura. PDRB yang paling tinggi ialah Kabupaten Pamekasan dan PDRB paling rendah ialah Kabupaten Pamekasan. Bisa dilihat pada keterangan yang ada di penjelasan PDRB berdasarkan atas dasar harga konstan guna mengetahui perkembangan output masing-masing suatu daerah. Nilai PDRB ini menjelaskan pengaruh perubahan harga tiap tahun periode penelitian.

Pada gambar 1.2 menjelaskan pertumbuhan ekonomi kabupaten bangkalan mengalami fluktuasi mengalami kontraksi 2011 sebesar 3.31%; menurun 2012 sebesar -1.42%; lalu meningkat 2013 sebesar 0.19%; 2014 sebesar 7.19%; turun lagi 2015 sebesar -2.66%; kemudian naik kembali 2016 sebesar 0.66%; 2017 sebesar 3.53%; 2018 sebesar 4.22%; hingga turun 2019 sebesar 1.03%. Hal ini

tidak selaras PDRB dibanding dengan laju pertumbuhan PDRB disebabkan oleh fluktuasi ekonomi di Kabupaten Bangkalan dari tahun 2011 hingga 2019, terlihat dari pertumbuhan volume ekonomi di sisi penawaran (produksi) dan sisi permintaan (permintaan akhir). Dari sisi produksi, wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat adalah kategori informasi dan komunikasi, serta penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, dengan laju pertumbuhan tahunan 7% -8%. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan terutama ditopang oleh pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) yang telah mencapai lebih dari setengah dari total Produk Domestik Regional Bruto.

(BPS, 2020) Peran pemerintah dalam pengeluaran PDRB untuk berbagai produk yang dievaluasi pada harga konstan 2010 atau pada harga 2010, dengan mengubah kuantitas atau kuantitas PDRB (tidak terpengaruh oleh perubahan harga). PDRB harga tetap menggambarkan pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan harga aktual atau perubahan (terutama terkait konsumsi atau permintaan akhir). Komposisi total pengeluaran PDB tidak terlepas dari semua komponen, antara lain komponen PK-RT (pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, PK-LNPRT (pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga layanan organisasi nirlaba), PK-P (konsumsi akhir pemerintah), PMTB (Modal tetap total), E (ekspor neto) atau ekspor dikurangi impor barang-barang dan jasa-jasa, kisaran kontribusi komponen PK-P (konsumsi pemerintah) adalah (-7,86)% - (6,5)%. Pemerintah menyerap produk dalam negeri dari Wilayah PDRB Efeknya tidak terlalu besar.

2. Kabupaten Pamekasan

(BPS, 2020) PDRB dengan harga yang konstan pada tahun 2010 dan pertumbuhan sejak 2019. Kemampuan wilayah Kabupaten Pamekasan dalam mengelola sumber daya alam dan sumber manusia yang dimiliki, dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan yaitu berfluktuatif cenderung meningkat. Kondisi ini digambarkan oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto kabupaten Pamekasan yang cenderung mengalami peningkatan.

Menghilangkan PDRB Kabuapten Pamekasan yang tidak terpengaruh perubahan harga. Kondisi perekonomian Kabupaten Pamekasan selama tahun 2011-2019 cenderung melambat meskipun terus tumbuh dengan laju sekitar 5%. Selama pertumbuhan ekonomi positif, berarti total volume perekonomian meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan agregat ekonomi tercermin dari sisi penawaran (produksi) dan sisi permintaan (permintaan akhir). Dalam hal produksi, kelompok pemasok akomodasi, makanan dan minuman memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi. Informasi dan komunikasi; industri manajemen; transportasi dan pergudangan; perdagangan, perawatan mobil dan sepeda motor dan kategori lainnya, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 7%. Sementara segi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan didominasi pertumbuhan ekspor serta pembentukan modal tetap bruto yang memberikan kontribusi rata-rata pertumbuhan lebih dari 5%.

Nilai komponen perubahan inventori yang semakin kecil menandakan bahwa semakin kecil menandakan bahwa semakin sedikit pula barang persediaan di setiap pelaku ekonomi. Artinya, hampir seluruh barang yang diproduksi habis dipergunakan/dikonsumsi oleh komponen lain. Dengan kata lain sirkulasi pergerakan ekonomi berjalan lancar.

Selama periode 2011-2019, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pamekasan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Walaupun mempunyai kecenderungan menurun, namun proporsi komponen ini masih diatas 3,66%. Belanja kegiatan PMTB (pembentukan modal Tetap Bruto) juga memiliki kontribusi yang relatif besar, sekitar 4,50% -6,71%. Sementara itu, kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) masih berkisar (-6,57) - (6,01)%. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap PDRB daerah tidak terlalu besar, menempati urutan kelima dalam perubahan konsumsi dan inventori LNPR, dan tingkat kontribusinya kurang dari 1,50%.

3. Kabupaten Sampang

(BPS, 2020) Harga konstan atau PDRB dihitung berdasarkan harga berbagai jenis produk yang dinilai dengan harga 2010. Dengan cara ini, kuantitas atau volume (tidak terpengaruh oleh perubahan harga) dari PDRB. Belanja PDRB (tidak berubah pada tahun 2010) sebenarnya menunjukkan perubahan atau pertumbuhan, terutama terkait dengan peningkatan permintaan atau konsumsi akhir.

Terlihat dari Gambar 1.2 bahwa selama periode tahun 2011-2019, PDRB ketiga Bupati tersebut sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan PK-RT (konsumsi akhir rumah tangga) sebesar 34% -6,84%. Sebab, hal ini menandakan bahwa produk luar daerah bahkan produk impor (luar negeri) tetap harus memenuhi kebutuhan lokal tertentu.

Kisaran konsumsi pemerintah (PK-P) adalah (-6,55%) - (7,40%). Artinya pemerintah tidak berlebihan dalam menyerap PDB. Total makro lainnya yang

berasal dari data pertumbuhan ekonomi PDRB atau ketiga bupati tersebut sedikit berfluktuasi selama 2011-2019, yaitu 2,50% pada 2011; 5,77% pada 2012; 6,53% pada 2013; 0,08 pada 2014%; 2,08% pada 2015; 6,17 % pada 2016; 4,69% pada 2017; 4,56% pada 2018 dan 1,42% pada 2019.

4. Kabupaten Sumenep

(BPS, 2020) Produk domestik bruto (PDB) regional yang diperoleh dengan harga konstan atau berdasarkan harga berbagai produk yang dievaluasi pada harga 2020. Melalui metode ini, produk domestik bruto (PDB) regional tahunan disediakan. Ini memberikan gambaran tentang Perubahan PDRB Daerah. Gambaran perubahan volume atau volume PDRB setiap tahun (tidak dipengaruhi oleh perubahan harga). Pengeluaran PDRB daerah terus mencerminkan pertumbuhan atau perubahan ekonomi aktual, dan terutama berhubungan dengan peningkatan permintaan / konsumsi akhir.

Peningkatan total output ekonomi dari PDRB daerah tercermin dari sisi penawaran (produksi) dan sisi permintaan (permintaan akhir). Dari sisi produksi, kategori konstruksi memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi, meningkat menjadi 10% pada tahun 2019, sedangkan tingkat pertumbuhan tahunan kategori penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman selalu 9%. Berdasarkan segi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep utama bergantung pada pertumbuhan komponen PK-RT (pengeluaran konsumsi rumah tangga) yang menyumbang setengah dari PDRB daerah. Kontribusi laju pertumbuhan PDRB merupakan kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P), yaitu antara (-9,24%) sampai (7,93%). Menjelaskan bahwa pemerintah dalam menyerap PDRB daerah tidak terlalu besar.

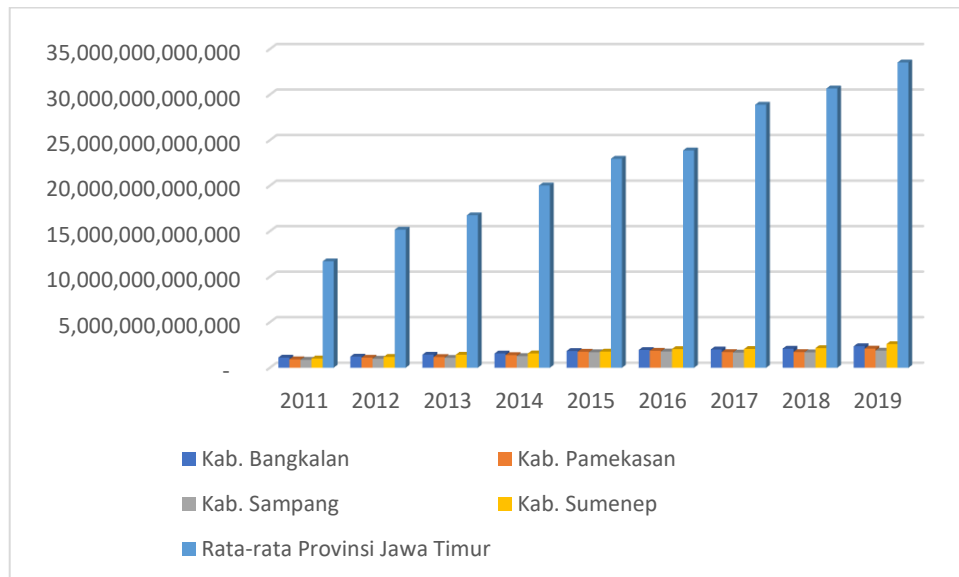
5. Perbandingan empat Kabupaten di Pulau Madura dan Kabupaten lain di Jawa Timur

Sebagaimana dapat dilihat dari Gambar 1.1 pada tabel di atas, perbandingan pertumbuhan PDRB empat wilayah / kota di Pulau Madura dengan rata-rata wilayah Jawa Timur dari tahun 2011 hingga 2019 menunjukkan peningkatan yang relatif meningkat. PDRB setiap kota atau kabupaten di Pulau Madura serta tingkat rata-rata kabupaten di Jawa Timur terkadang mengalami peningkatan. Diantara empat administrasi kabupaten / kota Madura, Kabupaten / kota administratif Sumenep memiliki PDRB tertinggi yaitu Rp. Selama periode 2011-2019 terjadi peningkatan sebesar Rp 23,81 juta. 6.15 juta. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya memiliki jumlah yang relatif kecil walau dalam periode ke periode mengalami peningkatan seperti Kabupaten Pamekasan periode 2011 Rp. 7,42 juta serta periode 2019 sebesar Rp. 11,40. Presentase Rata-rata PDRB daerah / kota lain yang ada di Jawa Timur juga mengalami peningkatan di setiap periodenya. Total tahun 2011 adalah Rp. 36,35, dengan total Rp pada 2019. 56.90. Selain tren pertumbuhan PDRB rata-rata regional di setiap wilayah Jawa Timur, Gambar 1.1 juga menunjukkan PDRB seluruh wilayah / kota di Pulau Madura berada jauh dibawah rata-rata Kabupaten yang ada di Jawa Timur.

Dari sisi anggaran pendapatan dan belanja daerah, belanja pemerintah di empat daerah / kota di Pulau Madura juga lebih rendah dari rata-rata belanja pemerintah daerah / kota lain di Jawa Timur. Dibandingkan dengan rata-rata belanja pemerintah daerah lain di Jawa Timur, rendahnya belanja atau relatif rendahnya pendapatan suatu daerah tidak lepas dari rata-rata belanja pemerintah empat daerah / kota di Pulau Madura.

Gambar 1.4

Rata-rata Belanja Daerah di Empat Kabupaten/Kota Pulau Madura dan Rata-rata Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Yang Ada Di Jawa Timur Tahun 2011-2019



Sumber : Data yang telah diolah dari DJPK KEMENKEU 2011-2019

Dapat dilihat pada Gambar 1.2 bahwa pengeluaran pemerintah di empat Kabupaten Pulau Madura dan Rata-rata Kabupaten data dari Provinsi Jawa Timur (2011-2019) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata empat wilayah di Pulau Madura dan Kabupaten Jawa Timur. Pada empat Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Madura besarnya presentase pengeluaran pemerintah tertinggi terdapat pada rata-rata Kabupaten/Kota Sumenep sebesar Rp. 1,757,176,795,084.45 dari periode 2011-2019. Sedangkan di Rata-rata Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Timur pada periode 2011-2019 presentasinya sebesar Rp. 7,015,837,816,371.82. Pada Gambar 1.2 juga menggambarkan bahwa pengeluaran pemerintah yang berada di empat Kabupaten/Kota Pulau Madura menunjukkan relatif jauh (rendah) dari Rata-rata pengeluaran pemerintah yang ada di Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur.

Sehingga pada gambar dua diatas disimpulkan bahwa pada gambar tersebut PDRB meningkat empat Kabupaten dari tahun ke tahun disebabkan adanya pengeluaran pemerintah yang meningkat di empat Kabupaten setiap tahunnya sebab itu terjadinya peningkatan PDRB diabarengin dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah setiap tahunnya.

Belanja pemerintah tersebut di atas merupakan belanja daerah yang digunakan untuk menyediakan dana bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Belanja pemerintah merupakan belanja daerah yang direncanakan dan diperoleh dari penjumlahan belanja langsung dan belanja tidak langsung. BTL (Belanja tidak langsung) seperti: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil. BL (Belanja langsung) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

1. Belanja Langsung

(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2011) Kebijakan belanja langsung terdiri dari baik urusan pilihan maupun urusan wajib ada 2 yaitu urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Contoh urusan wajib pelayanan dasar seperti (1) urusan pendidikan, (2) urusan kesehatan, (3) urusan pekerjaan dan tata ruang, (4) urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, (5) urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, (6) urusan sosial. Contoh urusan wajib non pelayanan dasar seperti (1) urusan tenaga kerja, (2) urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (3) urusan pangan, (3) urusan lingkungan hidup, (4) urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, (5) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, (6) urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (7) urusan

perhubungan, (8) urusan komunikasi dan informatika, (9) urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, (8) urusan penanaman modal, (9) urusan kepemudaan dan olah raga, (10) urusan statistik, (11) urusan kebudayaan, (12) urusan perpustakaan, (13) urusan kearsiapan.

Sedangkan belanja langsung dalam urusan pilihan seperti (1) urusan kelautan dan perikanan, (2) urusan pariwisata, (3) urusan pertanian, (4) urusan energi dan sumberdaya mineral, (5) urusan perdagangan, (6) urusan perindustrian, (7) urusan transmigrasi.

2. Belanja Tidak Langsung

Dalam (Agus, 2011) sebagian besar belanja tidak langsung dialokasikan untuk :

1. Belanja pegawai yang digunakan dalam tahun ke tahun. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk tunjangan-tunjangan kinerja dan gaji, dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diproyeksikan dengan pertimbangan jumlah pegawai sipil di suatu daerah.
2. Belanja hibah digunakan kepada hibah seperti (1) belanja hibah kepada pemerintah pusat (guna pengamanan masalah, operasi saber pungli dan pengamanan pilkada serentak, (2) belanja hibah kepada ormas/badan/lembaga, belanja hibah berbadan hukum Indonesia (bidang pemerintah, kepemudaan, pendidikan, dan kesehatan) dan belanja hibah kepada ormas berbadan hukum Indonesia juga yang dipentingkan guna bidang pendidikan, (3) belanja penunjang pilkada serentak pada Panwaslu dan KPU

3. Belanja bantuan sosial digunakan guna bantuan seperti (1) organisasi sosial kemasyarakatan (bantuan sosial kepada keluarga/individu dan bantuan kepada keluarga/individu yang tidak direncanakan) yang digunakan guna peningkatan kemakmuran masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku saat ini, (2) belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (lembaga sosial dan lembaga perekonomian)
4. Belanja bagi hasil sesuai proporsi desa produksi yang ada, dalam rangka penguatan keuangan tingkat desa untuk memungut pajak dan penerimaan daerah, mengalokasikan pada pemerintah kota / provinsi serta tingkat desa.
5. Belanja bantuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Desa Tahun 2014 menyebutkan bahwa belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa ditujukan untuk memperkuat pemerintahan desa. Alokasi belanja bantuan digunakan guna misalnya (1) memberikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk ADD (penyaluran dana pusat dan desa) dan DD (dana desa) di suatu daerah, dan (2) memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
6. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk kegiatan darurat (tidak biasa) yang belum pernah diperkirakan sebelumnya

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang ada diatas, maka penulis skripsi ingin meneliti lebih jauh lagi mana pengeluaran pemerintah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) melalui PMTB dengan studi kasus yang ada di Kabupaten/Kota Pulau Madura.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperjelas arah pelaksanaan penelitian agar penelitian dapat dilakukan secara tepat sasaran. Selain itu, dari sudut pandang penulis artikel ini, pertanyaan ini perlu dirumuskan sebagai metode pengambilan keputusan. Oleh karena itu, isi yang terkait dengan pernyataan masalah adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar variabel BL (Belanja Langsung) dan BTL (Belanja Tidak Langsung) berpengaruh terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di empat Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Madura?
2. Seberapa besar variabel BL (Belanja Langsung), BTL (Belanja Tidak Langsung), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berpengaruh terhadap PDRB di empat Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Madura ?
3. Seberapa besar BL (Belanja Langsung), dan BTL (Belanja Tidak Langsung) melalui variabel Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berpengaruh terhadap PDRB di empat Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi yang tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis atau mendeskripsikan BL (Belanja Langsung) dan BTL (Belanja Tidak Langsung) terhadap PMTB di empat Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Madura.

2. Untuk menganalisis atau mendeskripsikan BL (Belanja Langsung), BTL (Belanja Tidak Langsung) dan PMTB berpengaruh terhadap PDRB (Produk Daerah Bruto) di empat kabupaten/kota di Pulau Madura.
3. Untuk menganalisis atau mendeskripsikan BL (Belanja Langsung) dan BTL (Belanja Tidak Langsung) melalui variabel PMTB berpengaruh terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di empat Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Madura.

1.4 Batasan Masalah

1. Studi ini hanya melibatkan empat wilayah Kabupaten di Pulau Madura, yaitu Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.
2. Laporan data penelitian pada penelitian ini digunakan data tahunan yang meliputi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Produk Domestik Regional Bruto.
3. Periode penelitian yang diambil adalah pada tahun 2011 sampai 2019.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga mendapatkan gambaran bagi penerapan kebijakan serupa di daerah lain.
2. Manfaat secara ilmiah, diharapkan dapat menjadi referensi atau ide untuk penelitian serupa di masa mendatang.